

**PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN INDONESIA  
OLEH BADAN KEAMANAN LAUT MENURUT  
UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN<sup>1</sup>  
Oleh : Tiagas Arletiko<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut sesuai dengan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang, narkoba dan minyak, pencemaran lingkungan, penangkapan ikan tanpa izin usaha dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Penanganan pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia belum optimal akibat adanya kendala-kendala, seperti belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. 2. Penegakan hukum di perairan Indonesia oleh Badan Keamanan Laut dilakukan sesuai dengan kewenangannya secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dengan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut dengan sarana dan prasarana yang ada telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap penangkap ikan secara ilegal, penyelundup barang, narkoba dan minyak, pencemaran lingkungan, penangkap ikan tanpa izin usaha dan bentuk bentuk pelanggaran lainnya di wilayah perairan Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, Perairan, Badan Keamanan Laut

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan

sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.<sup>3</sup>

Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto "*jales viva jaya mahe*".<sup>4</sup>

Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, karena memiliki potensi sumber daya alam hayati, ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan merupakan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional, sehingga harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, maka untuk pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dibentuklah Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut dapat melaksanakan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kenyataan yang ada menunjukkan tantangan dan kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut ialah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga wilayah perairan Indonesia yang luasnya dua pertiga dari wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dapat mempengaruhi upaya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Fernando J. M. M. Manisoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101066

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 3.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut sesuai dengan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun Skripsi ini. Metode penelitian hukum normatif ditunjang dengan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Di Perairan Indonesia

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum di perairan Indonesia sesuai dengan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber berita sebagai berikut:

1. Banyak kasus penyelundupan di perairan dinilai akibat lemahnya pengamanan di laut. Penangkapan satu ton sabu di Anyer, Banten, baru-baru ini juga menjadi bukti konkret lemahnya pengamanan laut. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo mengatakan, ada ribuan jalur tikus di wilayah barat yang rawan untuk penyelundupan."Di bagian barat, kepulauan-kepulauan yang nampaknya bagian depan adalah gudang, di belakangnya langsung berhubungan dengan laut dan punya dermaga," ujar Arie dalam kunjungan ke redaksi SCTV-Indosiar dan Liputan6.com, Senayan City, Jakarta, Rabu (26/7/2017).<sup>5</sup>
2. Liputan6.com, Jakarta-Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengamankan kapal tongkang muat 5.500 MT batubara ilegal di Perairan Pelabuhan Pondong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, 27 Juli kemarin. Pengamanan dilakukan melalui Operasi Nusantara, yaitu KP Robin XII yang dikomandani Brigadir Polisi Satrio Utomo. Kepala UPH Bakamla RI Brigjen Pol

Frederik Kalalembang menyatakan, batu bara tersebut rencananya akan dibawa ke Samarinda, yang selanjutnya akan ditampung di kapal Mother Vessel MV Glovis Desire yang saat ini sedang lego jangkar di Perairan Muara Berau. Frederik juga mengatakan bahwa kapal tongkang Toby 221 yang ditarik oleh tugboat Bloro 1 tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bisa memperlihatkan dokumen aslinya."Diduga asal batubara tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di foto copy dokumen yang diperlihatkan, makanya kapal kita tangkap," jelas Frederik melalui keterangan tertulis, Kamis 27 Juli 2017.

3. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil mengungkap penyelundupan 30 ton minyak solar di Perairan Batu Ampar, Batam. Direktur Operasi Laut (Diropsla) Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Rahardjo mengatakan, penangkapan tersebut bermula saat kapal Bakamla, Rigid Inflatable Boat (RIB) bernomor seri R-10 milik Bakamla RI melakukan patroli, Senin (27/6/2016) dini hari. "Penangkapan terhadap kapal yang dinahkodai Andi tersebut bermula pada pukul 03.00 WIB saat para personel Bakamla RI dari Zona Wilayah Barat yang dipimpin Analis Keamanan Laut, Ditopsla Bakamla RI AKP Isram Achir Jatmiko tengah melakukan patroli," kata Rahmat dalam keterangan yang diterima, Senin (27/6/2016). Selanjutnya pada pukul 03.40 patroli mendapati kapal kayu tanpa nama bermuatan minyak solar sebanyak 30 ton yang didapat dari tug boat drago. Sejumlah personel Bakamla RI dari wilayah Zona Barat itu pun langsung melakukan penangkapan terhadap kapal bermuatan BBM ilegal dengan menggunakan perahu karet (RIB)."Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kapal dan lima tersangka dikawal menuju Dermaga Sekupang, Batam, dan diserahkan kepada Kabagops Bakamla Zona Wilayah," katanya. Diduga kapal tersebut telah melanggar UU migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 53 huruf (b) tentang pengangkutan jo Pasal 480 KUHP tentang penadahan ancaman hukuman 5 tahun penjara. "Penangkapan ini merupakan upaya serius Bakamla untuk menindak tegas

<sup>5</sup> Bakamla: Ribuan Jalur Tikus di Wilayah Barat Rawan Penyelundupan, Liputan6.com.htm Jakarta, diakses 10/31/2017. 8:42 PM.

seluruh kegiatan illegal di perairan Indonesia," katanya.<sup>6</sup>

4. MEDIAHARAPAN.COM, Jakarta-Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla RI siap menghalau selundupan narkoba melalui jalur laut. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Marsma TNI Demitrius Widiatoro, M.BA. dalam kesempatan wawancara live di program "Apa Kabar Indonesia Pagi", TV One. Wawancara dilakukan di studio TV One Epicentrum Walk, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2017). Saat ditanya mengenai sikap Bakamla RI tentang maraknya penyelundupan narkoba melalui jalur laut, Marsma TNI Widiatoro menyatakan kesiapan Bakamla RI dalam menghalau aksi distribusi obat-obatan terlarang melalui laut. "Bakamla RI beserta mitra maritim siap mengamankan perairan Indonesia dari distribusi narkoba melalui laut. Khususnya dalam hal operasi udara yang dilakukan Bakamla RI, hal tersebut tidak lepas dari pemantauan kami" jelas pejabat tinggi dari TNI Angkatan Udara ini. Tanya jawab yang dipandu oleh Indy Rahmawati dan Arif Fadil berlangsung hangat, terlebih lagi saat menginjak topik jalur distribusi narkoba yang dipilih. Jalur distribusi narkoba melalui laut kerap kali menjadi pilihan, karena dirasa cukup aman untuk menyelundupkan barang haram tersebut. "Jika melalui udara, titik masuknya melalui bandara yang notabene pemeriksaannya cukup ketat. Jika melalui laut, perairan Indonesia ini cukup luas dan ada kemungkinan untuk luput dari pengawasan", imbuh Marsma TNI Widiatoro. "Selain itu, sepanjang pantai yang ada di Indonesia dapat dijadikan tempat bongkar muat atau transaksi narkoba. Belum lagi jika tertangkap aparat, mereka dapat dengan mudahnya menghilangkan barang bukti dengan membuangnya ke laut", lanjutnya. Bakamla

<sup>6</sup> [http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2016/06/27/bakamla-gagalkan-pengiriman-30-ton-bbm-ilegal-di-perairan-batam&\\_ga=2.189488235.1591990918.1509707098-223943302.1436749885](http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2016/06/27/bakamla-gagalkan-pengiriman-30-ton-bbm-ilegal-di-perairan-batam&_ga=2.189488235.1591990918.1509707098-223943302.1436749885), Senin, 27 Juni 2016 17:42 WIB diakses 10/31/2017. 8:53 PM.

RI menyadari tidak akan dapat bekerja tanpa dukungan dari mitra maritim dan masyarakat sekitar. "Peran masyarakat, khususnya yang berada di pesisir, sangat penting. Mereka itu adalah agen informan terdepan bagi instansi yang berkepentingan di laut", imbuhnya saat menutup perbincangan. (MH007).<sup>7</sup>

5. Liputan6.com, Jakarta-Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan ada ribuan jalur tikus di wilayah barat Indonesia, yang rawan penyelundupan. Khususnya penyelundupan narkoba yang baru-baru ini terungkap hingga satu ton. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo mengatakan, pihaknya kini fokus penanganan tiga kasus. Yakni kasus *illegal fishing*, penyelundupan bahan bakar dan narkoba. "Dari 55 kasus (paling banyak) adalah illegal fishing, penyelundupan bahan bakar, kemudian saya sedang mengejar penyelundupan narkoba. Itu yang menjadi target utama," ujar Arie saat berkunjung ke redaksi SCTV-Indosiar dan Liputan6.com, Senayan City, Jakarta, Rabu (26/7/2017).<sup>8</sup>
6. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Patrol gabungan yang dipimpin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menangkap kapal tanker MT Blue Ocean 5 di perairan Jakarta, Senin (24/7/2017). Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Marinir Mardiono, mengatakan KAL Petir II-05 yang dinakhodai Kapten Laut (T) Sutrisna saat hendak patroli rutin di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia I memergoki MT Blue Ocean 5. "Kapal tersebut ditangkap karena saat diperiksa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta," ujar Mardiono dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (24/7/2017).<sup>9</sup>
7. Liputan6.com, Jakarta-Badan Keamanan Laut menggelar operasi penyelamatan dan

<sup>7</sup> <https://mediaharapan.com/category/nasional/Bakamla-RI-Siap-Halau-Selundupan-Narkoba-Melalui-Laut>, 2 Agustus 2017 21:16, diakses 10/31/2017. 9:28 PM.

<sup>8</sup> BAKAMLA/Sabu 1 Ton Terungkap, Bakamla Fokus Penyelundupan Narkoba - News Liputan6.com.htm. 26 Jul 2017, 20:58 WIB. Diakses 10/31/2017. 8: 41 PM.

<sup>9</sup> [http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2017/07/25/bakamla-tangkap-kapal-tanker-di-perairan-jakarta&\\_ga=2.155890811.1591990918.1509707098-223943302.1436749885](http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2017/07/25/bakamla-tangkap-kapal-tanker-di-perairan-jakarta&_ga=2.155890811.1591990918.1509707098-223943302.1436749885), diakses 10/31/2017. 8: 48 PM

pencarian korban tabrakan kapal di Selat Singapura. Insiden tabrakan melibatkan kapal tanker berbedera Indonesia dan kapal keruk berbendera Dominika, Rabu (13/9/2017) dini hari. Bakamla mengirim Kapal Nasional Belut Laut 4806. Direktur Operasional Badan Keamanan Laut, Laksamana Rahmat Eko Raharjo mengatakan kapal berangkat dari Pangkalan Bareleng, Batam. Saat ini KN Belut Laut tengah dalam perjalanan mencapai titik pencarian. Menurut dia, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Batam juga ikut dalam rombongan tim pencarian.<sup>10</sup>

8. Liputan6.com, Batam-Bakamla RI bersama TNI AL dan KKP mengamankan pemulangan 239 ABK berkewarganegaraan Vietnam yang berstatus non-justisia (bukan tersangka) melalui jalur laut. Serah terima dilaksanakan oleh KN 4806 Belut Laut dan KP Orca 2 kepada kapal Vietnam Coast Guard 8001 di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Rabu pagi. "Anak buah kapal yang dipulangkan merupakan nelayan Vietnam yang ditangkap Bakamla RI, TNI AL, dan KKP karena menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Mereka telah menjalani proses yang berlaku sehingga dapat dipulangkan ke negara asal," jelas Plt. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (4/10/2017). Proses pemulangan dimulai sekira pukul 02.00 dinihari, saat kapal VCG 8001 datang menjemput dan dilakukan pengawalan kapal menuju titik pertemuan guna proses pemindahan ABK di lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Pukul 07.00 WIB, ABK Vietnam mulai dipindahkan dari kapal Indonesia ke kapal VCG di titik temu di Perairan Batam, dan selanjutnya kapal dikawal hingga perbatasan. Kasubdit Operasi dan Pemantauan KKP Rahman juga mengungkapkan, melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara PSDKP dengan Bakamla RI, TNI AL, dan instansi terkait, sehingga ABK non-justisia

berkewarganegaraan Vietnam dapat dipulangkan.<sup>11</sup>

## **B. Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut**

Penegakan hukum di perairan Indonesia oleh badan keamanan laut sebagai bagian dari upaya pembangunan di bidang kelautan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya memerlukan keterpaduan dari berbagai sektor pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang kelautan.

Berlakunya Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, diharapkan dapat mengatur secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor instansi pemerintah di wilayah Laut untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengatur mengenai Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, Dan Keselamatan Di Laut, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 ayat:

- (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 ayat:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakannya sesuai

<sup>10</sup> Bakamla Bantu Pencarian Korban Tabrakan Kapal di Selat Singapura-News Liputan6 .com . htm, 13 Sep 2017, 11:31 WIB, diakses 10/31/2017. 8: 38 PM.

<sup>11</sup> Bakamla RI Pulangkan 239 Nelayan Asal Vietnam-News Liputan6.com.htm. 04 Okt 2017, 23:27 WIB. Diakses 10/31/2017. 8: 36 PM.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut dan udara. Dengan tercapainya kedaulatan di darat dan di laut, maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (di darat maupun di laut berupa kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan/kehidupan bangsa di segala bidang.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan penegakan kedaulatan di darat tidak sesulit dan serumit penegakan kedaulatan di laut karena batas wilayah negara di darat secara nyata dapat dibuat dan dilihat, lain halnya dengan penegakan kedaulatan di laut, akrena sangat sulit menentukan batas-batas nyata laut berhubung sifat laut/air yang berbeda dengan darat.<sup>13</sup>

Penegakan hukum di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah/wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (*security*) untuk kesejahteraan (*prosperity*) dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional (*international relation*).<sup>14</sup>

Upaya penegakkan kedaulatan sebagai salah satu misi penting Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang langsung menyentuh akar persoalan. Salah satu kebijakan yang

mendapatkan sorotan masyarakat tak terbatas hanya di Indonesia saja, namun hingga dunia internasional adalah keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti “mengibarkan bendera perang”, terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*.<sup>15</sup>

Upaya KKP dalam penenggelaman kapal asing dan eks asing tentu saja membutuhkan peran aktif pemerintah. Guna mengimplementasikan Undang Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, KKP membutuhkan kerja sama banyak pihak. Oleh karena itu, KKP merangkul beberapa elemen pemerintah, diantaranya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Kepolisian Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut dilakukan oleh KKP supaya pemberantasan *IUUF* dapat dilakukan efektif dan optimal. Upaya pemberantasan yang optimal diharapkan dapat menumbuhkan iklim yang kondusif, dan angin segar bagi industri sektor kelautan dan perikanan Indonesia.<sup>16</sup>

Selain hadir sebagai payung hukum, UU Perikanan No. 45 tahun 2009 yang juga mengatur penenggalaman kapal tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat Undang-Undang dan Permen lainnya. Penerapan yang konsisten dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. Implementasi UU ini juga didukung pembentukan Satgas Pemberantasan *IUUF* pada Oktober 2014.<sup>17</sup> Menyambut HUT RI ke-70, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana meledakkan 70 kapal illegal pencuri ikan. Peledakan dilangsungkan pada 18 Agustus 2015. Sebelumnya Menteri Susi menyatakan, sudah ada 36 kapal ilegal hasil tangkapan KKP yang bisa diledakkan. Sisanya dari hasil tangkapan TNI AL maupun pihak lain, seperti Polair dan Bakamla. Memasuki bulan September 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memerintahkan 16 kapal asing illegal yang ditangkap untuk ditenggelamkan secepatnya.

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta, hal. 2.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 2

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>15</sup> Mina Bahari, Edisi Khusus, Perang Terhadap IUUF, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hal. 23.

<sup>16</sup>Mina Bahari, Edisi Khusus, Tenggelamkan Kapal KKP Rangkul Elemen Pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hal. 24.

<sup>17</sup>*Ibid*.

Susi juga mengatakan sudah mengkonsultasikan keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.<sup>18</sup>

Menurut Susi penenggelaman itu sudah sesuai dengan aturan Indonesia maupun hukum internasional. Dimasa yang akan datang, Susi berencana penenggelaman tanpa proses pengadilan. Selama ini, lanjut Susi, penenggelaman kapal harus melalui prosedur pengadilan yang berbelit-belit. Padahal UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengizinkan penenggelaman terhadap kapal asing yang memasuki perairan Indonesia jika memiliki bukti yang cukup dan kuat. Dasar hukum akan lebih kuat setelah terbitnya peraturan moratorium kapal eks asing. Dengan langkah itu, kegiatan operasi kapal eks asing di perairan Indonesia akan menjadi bukti tambahan untuk menjatuhnya.<sup>19</sup>

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut sesuai dengan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu adanya penambahan jumlah sarana dan prasarana oleh pemerintah akan mempermudah tugas-tugas pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang, narkotika dan minyak, pencemaran lingkungan, penangkapan ikan tanpa izin usaha dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Penanganan pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia belum optimal akibat adanya kendala-kendala, seperti belum memadainya sarana dan prasarana pendukung.
2. Penegakan hukum di perairan Indonesia oleh Badan Keamanan Laut dilakukan sesuai dengan kewenangannya secara terintegrasi dan terpadu dalam satu

kesatuan komando dan kendali dengan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut dengan sarana dan prasarana yang ada telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap penangkap ikan secara ilegal, penyelundup barang, narkotika dan minyak, pencemaran lingkungan, penangkap ikan tanpa izin usaha dan bentuk bentuk pelanggaran lainnya di wilayah perairan Indonesia.

### B. SARAN

1. Untuk mencegah bentuk-bentuk pelanggaran hukum di perairan Indonesia, maka diperlukan dukungan semua instansi secara lintas sektoral yang memiliki tugas di bidang kelautan dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Diperlukan peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penegakan hukum.
2. Penegakan hukum di perairan Indonesia oleh Badan Keamanan Laut, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja Badan Keamanan Laut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Agoes R. Etty, (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2000.
- Agusman Dumoli Damos, *Hukum Perjanjian Internasional, (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)* Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 25.

- Anwar Chairul, *ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona EkONOMI Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Garfika Jakarta, Oktober 1995.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, Agustus, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta.
- Mina Bahari, Edisi Khusus, *Perang Terhadap IUUF*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- Mina Bahari, Edisi Khusus, *Tenggelamkan Kapal KKP Rangkul Elemen Pemerintah*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Muhamad Victor Simela, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, *Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nurweli Ilma, *Peri Laut Kembalikan Kejayaan Laut Nusantara*, Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, EDISI 01 | **APR - JUN** 2015.
- Parthiana Wayan I, *Perjanjian Internasional*, Bagian. I. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Rover C., de, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Penterjemah) Spardan Mansyur, Ed. I., Cet I. 2000, Diterjemahkan dari Buku Asli : *To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Siombo Ria Marhaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2010, Jakarta, 2010.
- Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Menenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkurus)* Dengan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2009.
- Sumarsono S., Agus Susarso, Hamdan Mansyur, Sudrajat, R.L. Pitoy, Akan Maskan, W, Suparman, Bastian Umar, Zamrudy Anwar, Mardy Arief, AN Sobana, Tjiptadi, Muklis Murak, Yudi Agustono, Chambali, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. 2006.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

#### Internet

<http://www.liputan6.com/BBM> untuk Patroli Laut Bakamla Hanya Rp 400 Ribu per Bulan Yoseph Ikanubun, 14 Jun 2017, 15:30 WIB, diakses, 10/31/2017. 8:44 PM.

<http://www.tribunnews.com/tag/ketapang/?url=asional/2015/10/07/kn-gajah-laut-milik-bakamla-buatan-galangan-kapal-di-bangka&ga=2.45935780.1660934985.1509505177-223943302.1436749885>. KN Gajah Laut Milik Bakamla Buatan Galangan Kapal di Bangka. Rabu, 7 Oktober 2015 23:02 WIB. Laporan Wartawan Bangka Pos, Khamelia. diakses, 10/31/2017. 9:14 PM.

Bakamla: Ribuan Jalur Tikus di Wilayah Barat Rawan Penyelundupan, Liputan6.com.htm Jakarta, diakses 10/31/2017. 8:42 PM.

BAKAMLA/Bakamla Amankan Kapal Muat Batubara Ilegal di Kaltim-News Liputan6.com.htm, 28 Jul 2017, 05:26 WIB, diakses 10/31/2017. 8:39 PM.

[http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut bakamla /?url = nasional / 2016/06/27 /bakamla-gagalkan-pengiriman-30-ton-bbm-ilegal-di-perairan-batam&\\_ga=2.189488235.1591990918.1509707098-223943302.1436749885](http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2016/06/27/bakamla-gagalkan-pengiriman-30-ton-bbm-ilegal-di-perairan-batam&_ga=2.189488235.1591990918.1509707098-223943302.1436749885), Senin, 27 Juni 2016 17:42 WIB diakses 10/31/2017. 8:53 PM.

[https://mediaharapan.com/category/nasional/Bakamla RI Siap Halau Selundupan Narkoba Melalui Laut, 2 Agustus 2017 21:16](https://mediaharapan.com/category/nasional/Bakamla-RI-Siap-Halau-Selundupan-Narkoba-Melalui-Laut,2-Agustus-2017-21:16), diakses 10/31/2017. 9:28 PM.

BAKAMLA/Sabu 1 Ton Terungkap, Bakamla Fokus Penyelundupan Narkoba - News Liputan6.com.htm. 26 Jul 2017, 20:58 WIB. Diakses diakses 10/31/2017. 8: 41 PM.

[http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut bakamla/?url=nasional/2017/07/25/bakamla-tangkap-kapal-tanker-di-perairan-jakarta&\\_ga=2.155890811.1591990918.1509707098-223943302.1436749885](http://www.tribunnews.com/tag/badan-keamanan-laut-bakamla/?url=nasional/2017/07/25/bakamla-tangkap-kapal-tanker-di-perairan-jakarta&_ga=2.155890811.1591990918.1509707098-223943302.1436749885), diakses 10/31/ 2017.8: 48 PM

Bakamla Bantu Pencarian Korban Tabrakan Kapal di Selat Singapura-News Liputan6.com.htm, 13 Sep 2017, 11:31 WIB, diakses 10/31/2017. 8: 38 PM.

Bakamla RI Pulangkan 239 Nelayan Asal Vietnam-News Liputan6.com.htm. 04 Okt 2017, 23:27 WIB. Diakses 10/31/2017. 8: 36 PM.